

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang besar dan berada urutan penduduk terbesar ke 4 dengan populasi sebesar 266,91 juta jiwa.¹ Indonesia juga memiliki UUD 1945 dan ideologi Pancasila, dimana negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) UUD 1945, dalam penyelenggaraan pemerintahan dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan di indonesia.²

Negara di Indonesia dikatakan sebagai Negara Hukum yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada norma-norma hukum. Artinya hukum harus dijadikan sebagai jalan keluar dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan perorangan maupun kelompok baik masyarakat maupun negara.

Menegakan hukum di Indonesia maka membutuhkan institusi penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dalam kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan

¹Data hasil supas 2019, *Jumlah Penduduk Indonesia 2019 Mencapai 267 Juta Jiwa*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa>, diakses tanggal 16 Agustus 2019.

² UUD 1945 Pasal 4 Ayat 1.

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, begitupun jaksa dan polri memiliki tugas dan fungsi masing-masing, adanya konstitusi di Indonesia terciptanya suatu keamanan, ketertiban, kedamaian, keadilan kesejahteraan masyarakat dan kepyhastian hukum³

Polisi awal di kenal dengan sebutan “*police*” dalam arti Organisasi Keamanan pada abad ke 19, dalam masa peralihan pemerintahan Inggris.⁴Yang dilihat dari eksistensi ilmu kepolisian suatu disiplin ilmu atau suatu cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, sejak tahun 1929 dengan sebutan *police science* yang telah di jadikan program study di *Universitas of Southern California-USA*, dan memberikan gelar sarjana pada kelulusan. Sedangkan di Indonesia dalam bidang ilmu kepolisian sudah berkembang sejak tahun 1945-1950 yang di kenal dengan nama Pengurusan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).⁵

Adapun sejarah kepolisian pada periode 1945-1950, dimana saat itu kepolisian berada dalam Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawetan pada masa awal mula kepolisian hanya di beri tugas untuk melakukan masalah administrasi namun pada tahun 1946 pada tanggal 1 Juli Djawetan Kepolisian bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri.⁶

³ Abdusalam.(2011). *politik hukum*, Jakarta:PTIK, h.1.

⁴Siswanto Surnaso.(2015).*pengantar ilmu kepolisian*, Jakarta Timur:pustaka perdamaian h.59.

⁵*Ibid.*, h. 228.

⁶ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Sejarah Polri*, www.polri.go.id. Hal 2 Di akses tanggal 3 juli 2019.

Pada tahun 1950-1959 negara Indonesia menganut sistem Parlementer disini terbentuknya UUDS 1950 dimana Kepala Kepolisian di jabat oleh R.S.Soekanto yang bertanggung jawab terhadap perdana menteri. Dan disini kepolisian masih berstatus sipil dan militer yang memiliki organisasi dan peraturan gaji tersendiri.

Presiden Soekarno pada masa orde lama menyatakan bahwa akan membentuk ABRI dimana terdiri dari angkatan perang dan kepolisian, namun R.S.Soekanto tidak menyetujui dikarenakan untuk menjaga keprofesionalisme kepolisian. Tepat pada tanggal 19 Juni 1961 DPR-GR mengesahkan UU pokok kepolisian No.13 Tahun 1961 polri, memiliki kedudukan yang sama dengan TNI,AD,AL dan AU disini termasuk kedalam unsur ABRI.⁷

Selanjutnya pada orde baru setelah G30S/PKI yang membuat tidak ada nya unsur-unsur ABRI, maka pada tanggal 24 Agustus 1967 menyatakan bahwa ABRI merupakan bagian dari organisasi Hankam di antaranya AD, AL, AU dan AK yang dimana dipimpin oleh panglima yang bertanggung jawab dan bertugas kepada Menhankam/Pangan.

Tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN), namun singkatannya tidak lagi KKN

⁷ *Ibid.*, h. 3

tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969.⁸

Polri sebagai agen penegak hukum memiliki sebuah tugas dan kewajiban, sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang ciri secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut, Sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, khususnya pada Pasal 13. Dalam ketentuan Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri bertugas:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum
3. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁹

Polri juga memiliki fungsi yang dimana tercantum pada fungsi Kepolisian yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut:¹⁰

1. Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah : “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan kemanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

⁸ *Ibid.*, h. 6

⁹ Kasman tasaripa. “*tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian*”, edisi 2 Volume 1 tahun 2013

¹⁰ *Ibid.*, h.6.

2. Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”¹¹.

Selain untuk menjaga NKRI Polri melakukan kemitraan dengan masyarakat agar terciptanya ketertiban di dalam masyarakat itu sendiri. Dikarenakan setiap masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda, dan masalah yang beraneka ragam. Masyarakat yang merupakan tanggung jawab petugas patroli harus banyak melakukan komunikasi dengan anggota masyarakat, dalam kegiatan perpolisian masyarakat, petugas patroli memberi informasi kepada institusi kepolisian tentang hal-hal yang di perlukan dalam kegiatan perpolisian tersebut.¹²

Kemitraan dengan masyarakat berarti memiliki perspektif perpolisian yang tidak hanya di tekankan pada penegakan hukum secara tradisional saja. Pandangan yang lebih luas ini diakui memberikan nilai terhadap kegiatan kegiatan yang membantu terciptanya ketertiban dan kesejahteraan sebuah lingkungan¹³. Kepolisian juga harus menciptakan pelayanan-pelayanan salah 1 nya melindungi Hak Asasi Manusia setiap anggota masyarakat agar timbulnya rasa dan membangun kepercayaan terhadap kepolisian dan juga menyadari pentingnya keberadaan Polisi yang terus menerus dan positif di tengah mereka.

¹¹ Kasman Tasaripa. 2013.”*Ilmu Hukum Legal Opinion*”, edisi 2, Vol 1.

¹² Kepolisian Negara Republik Indonesia.(2006). *Perpolisian Masyarakat, Jakarta* h.35.

¹³ *Ibid.*, h.16.

Pilpres dan Pileg tahun 2019 yang dilaksanakan pada waktu yang bersamaan memiliki tingkat kerawanan yang tinggi dan membutuhkan adanya suatu strategi untuk mengantisipasi berbagai kerawanan agar situasi tidak memanas dan pada saat pelaksanaannya bisa berjalan aman, tertib dan lancar. Konsep kemitraan Polri dan media massa, perlu untuk membangun sinergitas pemberian informasi kepada masyarakat secara cepat, transparan dan berkualitas.¹⁴

Polri beserta jajarannya melakukan pengamanan terhadap penyelenggaraan Pilpres dan Pileg 2019, sehingga diperlukan strategi dalam melakukan pengamanan penyelenggaraan Pilpres dan Pileg tersebut agar dapat berjalan dengan aman, tertib, dan demokratis. Salah satu dari beberapa kasus ialah ujaran kebencian di media sosial, Menurut Amnesty Internasional, di Indonesia praktik politik dengan menggunakan ujaran kebencian dilakukan melalui sejumlah isu. Isu pertama yaitu tuduhan adanya kebangkitan PKI. Kedua, ujaran kebencian berbasis sentimen agama, yang mulai menguat sejak Pilkada DKI 2017.

Maka Polri menggunakan pendekatan dan meninjau setiap media sosial dan membuat kebijakan peraturan ialah Polri menerbitkan Surat edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan ujaran Kebencian (*SE Hate Speech*). Surat edaran ini terdiri dari empat butir yang mengatur antara lain lingkup perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai hate speech dan tindak pidana yang berkaitan. Tujuan kapolri mengeluarkan SE

¹⁴ Juardi jumaing, 2019. Ilmu kepolisian. *Kemitraan Polri dan Media Massa dalam Pemeliharaan Kamtibmas Menuju Pemilu 2019 yang Aman, Tertib dan Lancar* Vol 13 nomor 1 .

Hate Speech adalah memberitahukan anggotanya agar memahami langkah-langkah penanganan perbuatan ujaran kebencian atau *hate speech*.¹⁵

Dengan adanya kebijakan ini dapat menjadi kondusif dan mengamankan agar tidak adanya hoax atau berita bohong dan ujaran kebencian yang menimbulkan konflik saat Pemilu dan Pilpres 2019. Selain ujaran kebencian, hoax, adapun terjadinya kisruh pada 22 Mei Polri menangani para pedemo secara teratur. Dalam pasal 23 mengenai peraturan bahwa aparat kepolisian harus dapat membedakan antara peserta demo yang anarkis dan yang tidak anarkis.

Tanggapan masyarakat perihal Polri selama masa Pilpres 2019 masyarakat sekarang banyak beranggapan bahwa Polri tidak lagi netral dan menurunnya rasa kepercayaan di dalam masyarakat terhadap Polri dikarenakan bahwa ada dugaan Polri hanya berpihak kepada salah satu pasangan calon Presiden dan di tambah lagi adanya dugaan ketidakadilan dan lebih membela pendukung dari salah satu calon.¹⁶

Munculnya berbagai pemberitaan miring tentang institusi Polri melalui media massa dan online sangat mempengaruhi opini masyarakat dan menurunkan citra Polri di mata masyarakat. Hal ini kalau dibiarkan terus dapat menimbulkan sentimen negatif dan kurangnya rasa simpati dan empati masyarakat terhadap Polri yang pada akhirnya berpengaruh terhadap ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri.

¹⁵ Lestari Victoria Sinaga, (2019). *Tinjauan Sosial Dalam Pencegahan Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 Jurnal Rectrum*, volume I, Nomor 1.

¹⁶ Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2006). *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta h.40.

Citra Polri sangat berpengaruh bagi institusi Kepolisian jika terus menurun maka akan berdampak negatif dan masyarakat tidak akan percaya lagi dan beranggapan Kepolisian itu tidak penting lagi. jika itu terjadi maka tidak ada lagi kecondusifan dalam masyarakat di Indonesia, dan Polri dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni:

1. Perlindungan masyarakat;
2. Penegakan Hukum;
3. Pencegahan pelanggaran hukum;
4. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat.¹⁷

Sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayoman dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku.¹⁸

Dari ke empat peran jika citra Polri memburuk atau menurun akan mengakibatkan empat peran di Kepolisian itu tidak lagi berfungsi dikarenakan masyarakat tidak percaya dan keikutsertaan masyarakat dalam memberikan informasi berkurang sehingga ketertiban dan keamanan masyarakat akan terhambat untuk dilakukan dikarenakan tidak ada lagi peran penting Polri bagi masyarakat. Maka dari itu hubungan citra Polri dengan Peran Polri sangatlah berpengaruh.

¹⁷ Kasman tasaripa.(2013). *tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian*, edisi 2 Volume 1. h.3.

¹⁸ *Ibid.*,h.5

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pandangan masyarakat kota Palembang terhadap citra polri dalam pilpres 2019, dengan mengambil judul Skripsi : **Citra Polri Bagi Masyarakat (Analisis Citra Polri Dalam Pilpres 2019 Bagi Masyarakat Kota Palembang)**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Citra Polisi Republik Indonesia (Polri) Bagi Masyarakat Kota Palembang dalam Pilpres 2019?
2. Bagaimana Citra Polisi Republik Indonesia (Polri) dalam menyelesaikan persoalan yang timbul saat masa Pilpres 2019?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Citra Polri Bagi Masyarakat Kota Palembang dalam Pilpres 2019.
2. Untuk mengetahui Citra Polri dalam menyelesaikan persoalan yang timbul saat masa Pilpres 2019.

D. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu politik terutama pada Citra Polri bagi Masyarakat dalam pilpres 2019. Di harapkan mampu menjadi acuan dalam penelitian di masa depan terkait bagaimana cara Citra Polri terhadap Peran Polri agar tetap netral pada saat Pilpres.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini di harapkan mampu menjadi masukan bagi Polri, terutama dalam Citra Polri terhadap peran polri selama Pilpres yang di nilai oleh masyarakat terutama bagi tokoh-tokoh yang berperan di dalam masyarakat, dengan adanya penelitian ini di harapkan agar Polri tetap menjaga kenetralitas tanpa memihak salah satu calon di dalam pemilu.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut :

- 1. Judul :** Suardi jumaing (2019) “*Kemitraan Polri Dan Media Massa Dalam Pemeliharaan Kamtibmas Menuju Pemilu 2019 Aman, Tertib Dan Lancar*”.¹⁹

¹⁹ Suardi jumaing.(2019). *Kemitraan Polri dan Media massa dalam pemeliharaan Kamtibmas menuju pemilu 2019 aman,tertib dan lancar . Jakarta Selatan Volume 13 Nomor 1 April 2019.*

Hasil Penelitian : Dari hasil penelitian bahwa Pilpres dan Pileg tahun 2019 yang dilaksanakan pada waktu yang bersamaan memiliki tingkat kerawanan yang tinggi dan membutuhkan adanya suatu strategi untuk mengantisipasi berbagai kerawanan agar situasi tidak memanas dan pada saat pelaksanaannya bisa berjalan aman, tertib dan lancar, jika tidak diamankan oleh Polri maka terjadinya ujaran-ujaran kebencian dan tidak terjadi kondusif hoax dimana di tambah munculnya berbagai pemberitaan miring tentang institusi Polri melalui media massa dan online sangat mempengaruhi opini masyarakat dan menurunkan citra Polri dimata masyarakat .

Perbedaan : Adapun yang membedakannya, penelitian terdahulu lebih fokus membahas tentang keamanan Polri dalam Pilpres dan Pileg 2019 agar berjalan aman, tertib, dan lancar, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus pada Citra Polri selama Pilpres 2019 berlangsung dalam prespektif masyarakat kota Palembang.

2. **Judul :** Teguh soedarsono (2010) *“Netralitas Polri Dalam Pesta Demokrasi Pemilu Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan”*²⁰.

Hasil Penelitian : Hasil penelitian mengetahui bahwa dalam pemilu tidak semua warga memiliki hak politik di antaranya TNI dan Polri, hal ini dimaksudkan sebagai upaya memelihara dan menjaga sikap netralitas dalam demokrasi dan proses pemilihan umum, baik legislatif maupun pemilihan presiden.

²⁰ Teguh soedarsono.(2010). *Netralitas polri dalam pesta demokrasi pemilu perspektif pendidikan kewarganegaraan* . Volume XI nomor 2.

Perbedaan : Adapun yang membedakannya, penelitian terdahulu lebih fokus membahas tentang Hak politik tidak di miliki semua warga, di antaranya TNI dan Polri hal ini dilakukan agar tetap terjaganya kenetralitasan dalam pemilu, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus pada Citra Polri di Pilpres 2019 yang di ukur dari kenetralitasan dalam Prespektif masyarakat kota Palembang.

3. **Judul :** Setiajeng Kadarsih dan Tedi Suadrajat (2010) “*Analisis Terhadap Hak Pilih TNI dan POLRI Dalam Pemilihan Umum*”.²¹

Hasil Penelitian : Dari hasil penelitian ABRI dan Polri tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih agar netral dan citra tetap meningkat agar mendapat kepercayaan di dalam masyarakat dan juga dalam pemilu tetap berjalan dengan baik dan masyarakat tetap kondusif. Namun di dalam wadah ABRI dan Polri tetap di berikan kewenangan dalam proses politik melalui proses pengangkatan guna menjadi legislatif.

Perbedaan : Adapun yang membedakannya, penelitian terdahulu lebih fokus membahas tentang Hak Pilih TNI dan Polri dalam pemilu tidak ada namun TNI dan Polri memiliki kewenangan dalam mengamankan selama berlangsungnya Pemilu, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus pada Citra Polri yang tidak memiliki Hak dalam memilih dan hanya menjaga kenetralitasan dan keamanan selama berlangsungnya Pilpres 2019.

²¹ Setiajeng Kadarsih dan Tedi Suadrajat.(2010). *Analisis terhadap hak pilih TNI dan POLRI dalam pemilihan umum*. Artikel merupakan hasil penelitian yang di danai oleh DIPA Universitas Jendral Soerdiman jawa tengah.

4. **Judul :** Muardi (2018) “*Urgensi Peran Profesionalisme Polri Dalam Praktik Demokrasi Lokal*”.²²

Hasil Penelitian : Dari hasil penelitian ini bahwa profesionalisme Polri agar citra institusi baik dilakukan secara operasional dapat dilihat pada Lima hal yang menjadi perhatian Polri, yakni: Pertama kebijakan dalam bentuk diskresi kepolisian. Kedua efektifitas penegakan hukum kepemiluan. Ketiga, efektifitas pengamanan hajat politik demokrasi. Keempat, deklarasi dan melakukan ikrar netral dari institusi terkait. Kelima, tata kelola koordinasi dengan instansi keamanan dan penegakan hukum lainnya.

Perbedaan : Adapun yang membedakannya, penelitian terdahulu lebih fokus membahas tentang profesionalisme Polri saat Pemilu agar berjalan aman, tertib, dan lancar. sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus pada Citra Polri selama Pilpres 2019 berlangsung dalam prespektif masyarakat kota Palembang.

5. **Judul :** Rian sacipto (2018) “*Eksistensi Polri Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Menyongsong Pesta Demokrasi Indonesia 2019*”.²³

Hasil Penelitian : Dari hasil penelitian bahwa di dalam demokrasi ada hak dalam memilih dan di pilih pada pemilu 2019 ini Polri harus mewaspadai potensi-potensi yang bisa menyebabkan pelanggaran dalam pelaksanaan

²² Jurnal ilmu kepolisian Muardi.(2018). *urgensi peran profesionalisme Polri dalam Praktik demokrasi local*, program studi pascasarjana Ilmu Politik fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Padjajaran ,bandung. Volume 12 Nomor 1.

²³ Rian sacipto.(2018). *Eksistensi Polri Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Menyongsong Pesta Demokrasi Indonesia 2019*. fakultas hukum Universitas ungaran jawa tengah Volume 4 Nomor 2.

pesta demokrasi. Dimana eksistensi polri sebagai pengayom, pelindung, pengamanan serta penegakan hukum terhadap masalah-masalah pelanggaran pemilu yang bermuara terhadap tindak pidana. dan polri diminta agar tetap netral dalam melakukan tindak pidana agar demokrasi berjalan semestinya.

Perbedaan : Adapun yang membedakannya, penelitian terdahulu lebih fokus membahas dalam pemilu 2019 Polri harus melihat potensi-potensi jika ada pelanggaran selama pemilu berlangsung dan bersikap adil. sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan membahas tentang citra Polri dalam menangani permasalahan-permasalahan yang timbul dalam Pilpres 2019 dengan netral.

6. Judul : Sarah Nuraini Siregar (2019) “Netralitas Polri Menjelang Pemilu Serentak 2019”²⁴.

Hasil Penelitian : Dari hasil penelitian bahwa harapan akan pemilu tentu perlu didukung oleh banyak aspek. Salah satunya adalah pelaksanaan pemilu yang terbuka, jujur, adil, dan berlangsung dalam situasi yang kondusif. Diperlukan peran yang optimal baik dari pemerintah, penyelenggara pemilu (KPU), elit politik yang berkompetisi, dan terutama pula Polri sebagai penanggungjawab keamanan masyarakat. Tanggungjawab keamanan ini idealnya diterjemahkan sebagai bagian dari upaya membentuk Polri yang profesional. Artinya, semua anggota Polri

²⁴ Sarah nuraini siregar, (2019), *Jurnal Penelitian Politik* , Volume 16 No. 1.

menjalankan tugasnya dengan rasa independensi yang kuat dan tidak terpengaruh oleh politik.

Perbedaan : Adapun yang membedakannya, penelitian terdahulu lebih fokus membahas kenetralitasan Polri agar tidak terpengaruh dalam keberpihakan oleh politik. sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan membahas tentang Citra Polri di Pilpres 2019 dalam prespektif masyarakat kota Palembang.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian sejarah teori biasa dinamakan “karangka refrensi” atau “skema pemikiran”. Dalam penelitian yang lebih luas merupakan suatu perangkat kaidah yang memandu sejarawan dalam penelitiannya, menyusun bahan-bahan (data) yang diperoleh dari analisis sumber dan juga mengevaluasi hasil penemuan.²⁵ Dalam meneliti Citra polri bagi masyarakat, peneliti menggunakan teori citra (image) dalam jenis *Current Image* (Citra Kini).

1. Teori Citra (Image)

Teori Image politik menurut Frank Jefkins dalam buku *Public Relations*, definisi citra dalam konteks humas, citra diartikan sebagai “kesan, gambaran, atau impresi yang tepat (sesuai dengan kenyataan) atas sosok keberadaan berbagai kebijakan personil personil atau jasa-jasa dari suatu organisasi atau perusahaan”.²⁶

²⁵Abdurahman. 2012. *Kerangka Referensi*, h. 29.

²⁶ Frank Jefkins, (2003). *Public Relations*. Edisi Kelima, Terjemahan Daniel Yadin Jakarta: Erlangga h. 93.

Terdapat empat komponen proses citra menurut Frank Jefkins antara lain :²⁷

- a **Persepsi**, diartikan sebagai hasil pengamatan unsur lingkungan yang dikaitkan dengan suatu proses pemaknaan dengan kata lain. Individu akan memberikan makna terhadap rangsang berdasarkan pengalamannya mengenai rangsang. Kemampuan mempersepsi inilah yang dapat melanjutkan proses pembentukan citra. Persepsi atau pandangan individu akan positif apabila informasi yang diberikan oleh rangsang dapat memenuhi kognisi individu.
- b **Kognisi**, yaitu suatu keyakinan diri dari individu terhadap stimulus keyakinan ini akan timbul apabila individu harus diberikan informasi-informasi yang cukup dapat mempengaruhi perkembangan kognisinya.
- c **Motivasi** dan sikap yang ada akan menggerakkan respon seperti yang diinginkan oleh pemberi rangsang. Motif adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan.
- d **Sikap** adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berfikir, dan merasa dalam menghadapi obyek, ide, situasi atau nilai. Sikap bukan prilaku tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan prilaku tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku

²⁷ Elfinaro Ardianto, *Dasa-Dasar Public Relation* , Bandung : PT remaja rosdakarya, h.

dengan cara-cara tertentu, sikap mempunyai daya pendorong atau motivasi sikap menentukan apakah orang harus pro atau kontra terhadap sesuatu, menentukan apa yang disukai, diharapkan dan diinginkan, sikap mengandung aspek evaluatif artinya mengandung nilai menyenangkan atau tidak menyenangkan, sikap juga diperhitungkan atau diubah.

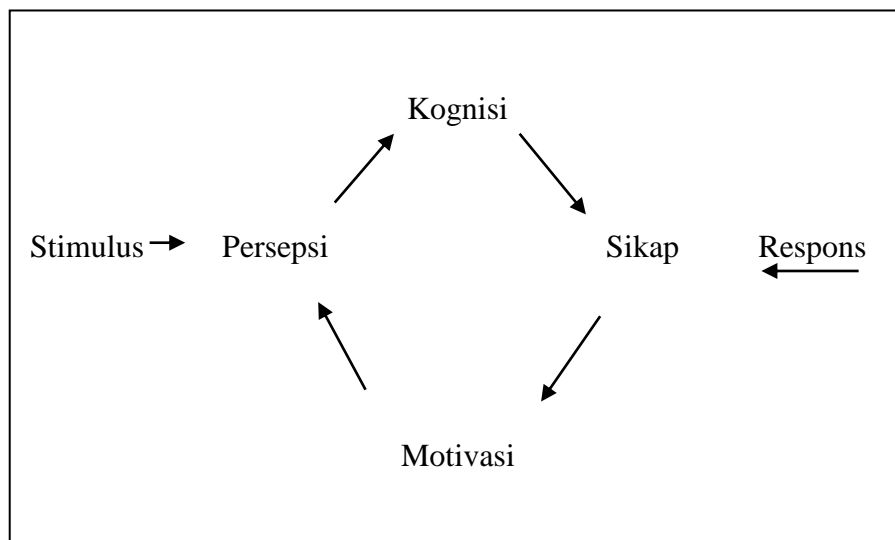
Proses ini menunjukkan bagaimana stimulus yang berasal dari luar diorganisasikan dan mempengaruhi respons. Stimulus atau rangsangan yang diberikan pada individu dapat diterima atau ditolak. Jika rangsangan ditolak, maka proses selanjutnya tidak akan berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa rangsangan tersebut tidak efektif dalam mempengaruhi individu karena tidak adanya perhatian dari individu tersebut. Sebaliknya, jika rangsangan itu diterima oleh individu, berarti terdapat komunikasi dan perhatian dari organisme, dengan demikian proses selanjutnya dapat berjalan.²⁸

Begitu pula dengan Public Relations dalam hubungannya dengan publik, haruslah senantiasa mengorganisasi pesan agar stimulus yang ada pada publik akan diterima dengan baik dalam hal ini mencapai citra yang baik. Maka berikut ini terdapat bagan dari orientasi Public Relations , yakni image building (membangun citra).

²⁸ *Ibid.*,

Peneliti memahami bahwa Terdapat empat komponen pembentukan citra, yaitu persepsi, kognisi, motivasi dan sikap. Persepsi diartikan sebagai hasil pengamatan unsur lingkungan dimana kemampuan mempersepsi inilah dapat melanjutkan proses pembentukan citra dengan memberikan informasi-informasi kepada individu untuk memunculkan suatu keyakinan. Sehingga dari keyakinan tersebut timbul suatu sikap pro dan kontra tentang produk dari itulah terbentuknya citra yang positif dan negatif.

Gambar 1.1 Bagan Proses Citra²⁹



Adapun Citra dari frank jefkins memiliki 5 macam menurut yaitu :

a. *Mirror Image* (Citra Bayangan).

Citra ini melekat pada orang dalam atau anggota-anggota organisasi – biasanya adalah pemimpinnya – mengenai anggapan pihak luar tentang organisasinya. Dalam kalimat lain, citra

²⁹*Ibid.*,

bayangan adalah citra yang dianut oleh orang dalam mengenai pandangan luar, terhadap organisasinya. Citra ini seringkali tidak tepat, bahkan hanya sekedar ilusi, sebagai akibat dari tidak memadainya informasi, pengetahuan ataupun pemahaman yang dimiliki oleh kalangan dalam organisasi itu mengenai pendapat atau pandangan pihak-pihak luar. Dalam situasi yang biasa, sering muncul fantasi semua orang menyukai kita.

b. *Current Image* (Citra Kini).

Citra yang erat kaitannya dengan word of mouth atau informasi yang di peroleh dari orang lain. Citra kini berkaitan dengan pengalaman seseorang mengenai suatu organisasi/instansi/perusahaan yang kemudian pengalaman yang dia dapatkan diceritakan kepada orang lain. Hal tersebut tidak akan menjadi sebuah permasalahan ketika yang diceritakan adalah hal positif mengenai instansi, tapi akan menjadi suatu permasalahan yang serius ketika pengalaman yang di ceritakan adalah sesuatu yang negatif mengenai instansi, yang sifatnya permusuhan, kecurigaan, prasanga buruk (*prejudice*) sehingga mengakibatkan munculnya kesalahpahaman yang mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap suatu instansi.

c. *Multiple Image* (Citra Majemuk).

Yaitu adanya *image* yang bermacam-macam dari publiknya terhadap organisasi tertentu yang ditimbulkan oleh mereka yang

mewakili organisasi kita dengan tingkah laku yang berbeda-beda atau tidak seirama dengan tujuan atau asas organisasi kita.

d. *Corporate Image* (Citra Perusahaan).

Apa yang dimaksud dengan citra perusahaan adalah citra dari suatu organisasi secara keseluruhan, jadi bukan sekedar citra atas produk dan pelayanannya.

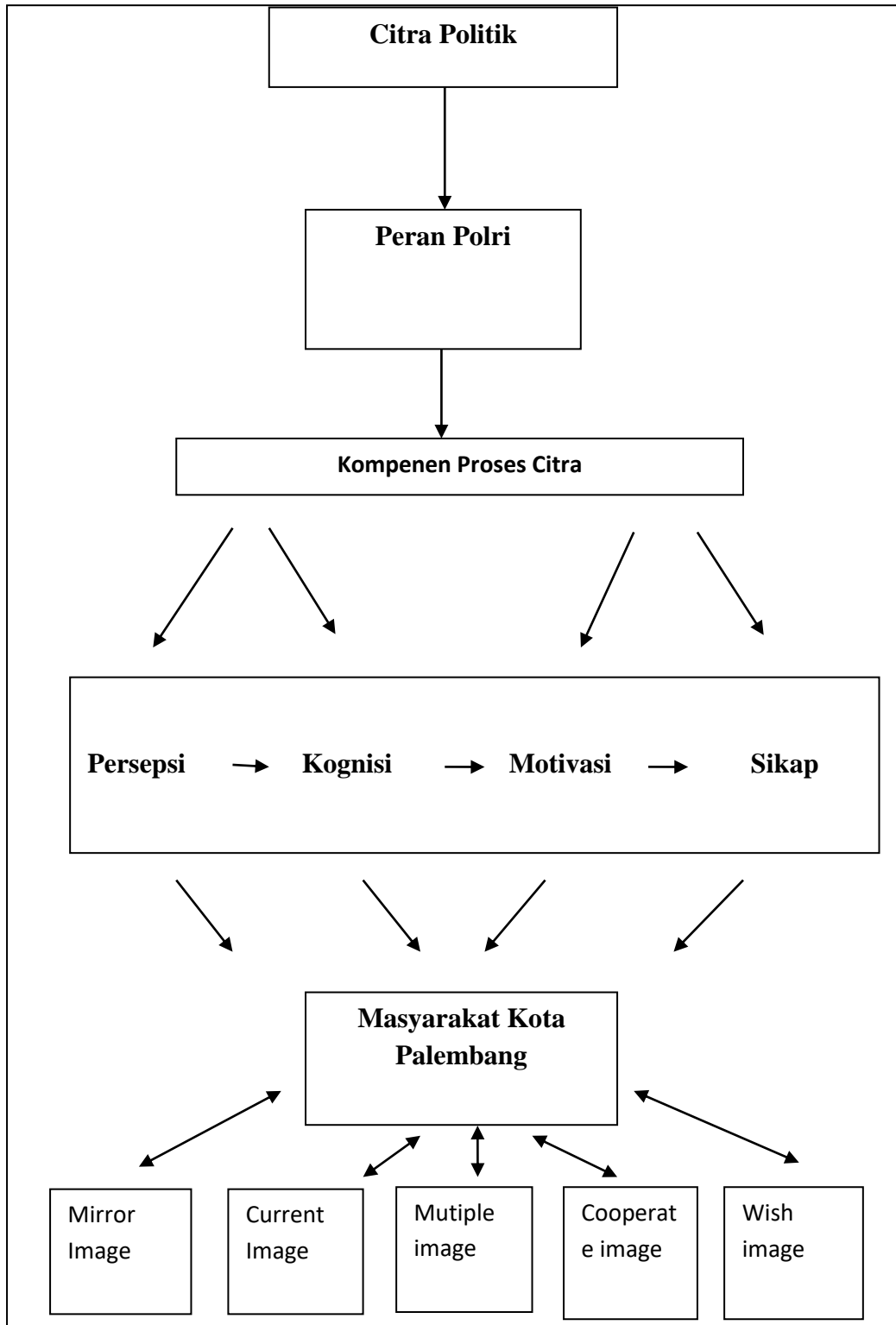
e. *Wish Image* (Citra Yang Diharapkan).

Citra harapan adalah suatu citra yang diinginkan oleh pihak manajemen atau suatu organisasi. Citra yang diharapkan biasanya dirumuskan dan diterapkan untuk sesuatu yang relatif baru, ketika khalayak belum memiliki informasi yang memadai mengenainya.³⁰

Menurut pemikiran peneliti, berdasarkan penjabaran di atas mengenai teori Citra (image) dari Frank Jenfkens tersebut, penelitian yang berjudul Citra Polri Bagi Masyarakat (Analisis Citra Polri Dalam Pilpres 2019 Bagi Masyarakat Kota Palembang) akan di teliti menggunakan Teori *Current Image* (Citra Kini), Karena teori tersebut paling tepat untuk mengetahui bagaimana penilaian Masyarakat kota palembang terhadap Citra Polri dalam Pilpres 2019.

³⁰ Frank Jefkins, (2003), *Public Relations*, Edisi Kelima, Terjemahan Daniel Yadin, Jakarta: Erlangga.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan / Metode Penelitian

Tipe Penelitian ini yaitu tipe deskriptif, sebuah penelitian yang dibuat dengan tujuan utamanya agar memberi gambaran atau deskripsi mengenai suatu situasi secara objektif, perihal tanggapan masyarakat kota Palembang terhadap citra polri pada saat Pilpres 2019. Dimana Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara langsung, catatan-lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi.

Pendekatan penelitian ini yaitu kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yaitu;

- 1) menggambarkan dan mengungkapkan,
- 2) menggambarkan dan menjelaskan.³¹

Dalam konteks penelitian Citra Polri peneliti menjelaskan dan menganalisis setiap tanggapan Masyarakat kota Palembang terhadap citra polri saat Pilpres 2019. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif, dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala kecil dan mengamati

³¹Muhammad.2016. *Metode Penelitian Bahasa*. Yogyakarta: Ar- Ruzz Media.

budaya setempat, ciri khas dan lingkungan sekitar di Kota Palembang dan mengenai Hubungan masyarakat dengan Polisi di kota Palembang.

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah Data yang diperoleh peneliti secara langsung. Sumber data dalam Penelitian ini yaitu Pemilihan anggota masyarakat kota Palembang sebagai informan untuk mengetahui citra polri dimata masyarakat, disini peneliti akan mewawancarai secara langsung 10 (sepuluh) profesi dan mengambil 2 (dua) sampel dari masing-masing profesi, jadi hasilnya ada 20 (dua puluh) orang yang peneliti wawancarai lewat tatap muka, peneliti menggunakan kategori Profesi : TNI, Guru, Dosen, RT, Pengusaha, Perawat, Buruh, Satpam, Pegawai Swasta, Tokoh Agama. Dengan demikian informan dalam penelitian ini adalah Laki-Laki dan Perempuan yang berusia antara 17-60 Tahun dari berbagai Profesi.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. misalnya, yang diperoleh penulis dari buku-buku, jurnal, internet, berita dan sumber lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini sehingga data yang di ambil dapat menghasilkan data yang akurat dalam penelitian citra polri

bagi masyarakat analisis peran polri dalam pilpres 2019 bagi masyarakat kota Palembang.³²

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui penelitian ini yaitu :

a. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan melakukan pedoman wawancara dan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada objek yang diteliti. Teknik wawancara mendalam digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara mendalam adalah proses perolehan keterangan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan.

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, merupakan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur agar fokus pada pokok permasalahan peneliti. Wawancara dilakukan kepada para informan, dengan menggunakan alat perekam, peneliti akan meminta ijin agar informan bersedia untuk diwawancarai menggunakan alat perekam untuk memperoleh hasil wawancara yang akurat dan agar tidak kehilangan informasi.

³² Muhajirin Maya Panorama.(2018). *Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta : Idea Press, h. 201.

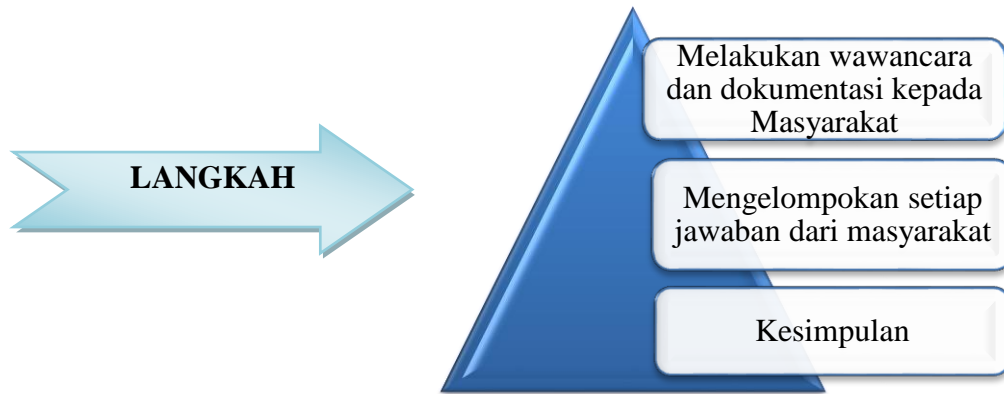
Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada masyarakat di tempat objek penelitian, dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Kota Palembang. Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan Teknik sampling representatif yang dimana penentuan sampel berdasarkan dari perwakilan dari suatu golongan tertentu dimana data yang berupa tulisan, rekaman dari suatu perwakilan, dengan ini dapat melengkapi data yang diberikan oleh setiap perwakilan atas golongan tersebut.³³

b. Dokumentasi

Adapun teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini adalah pengumpulan data yang berkaitan dengan Citra Polri bagi masyarakat analisis Peran Polri dalam Pilpres 2019 Bagi masyarakat kota Palembang. yang bersumber dari buku-buku jurnal, internet, berita dan sumber yang lainnya yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti, dari data tersebut kemudian dilakukan pengumpulan, penyusunan, penganalisaan dan penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan.

Gambar 1.1. Teknik pengumpulan data

³³ Artikel Siana. 2017. <https://www.artikelsiana.com/2018/01/pengertian-representatif-representasi-menurut-para-ahli-proses-contoh.html> di akses tanggal 16 Agustus 2019



Sumber : Diolah Peneliti

4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah Kota Palembang. Karena peneliti ingin mengetahui hubungan masyarakat terhadap Polri dalam sehari-hari. Dan Pada saat pilpres 2019 Polri ikut berperan dalam menjaga agar tetap kondusifnya selama berlangsungnya pilpres 2019 namun setelah itu banyak berita-berita negatif yang menganggap Polri tidak lagi netral dan lebih memihak salah 1 calon yang membuat Citra Polri menurun di mata masyarakat.

Hal inilah membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di kota Palembang untuk melihat bagaimana padangan atau reaksi masyarakat kota Palembang tentang Citra Polri dalam Pilpres 2019.

5. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara untuk meningkatkan pemahaman tentang objek dan menyajikan sebagai penemuan bagi orang lain. Pada penelitian ini peneliti melakukan analisis data yang telah terkumpul.

Tahap-tahap yang dilakukan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

a. Reduksi

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.³⁴ Pada tahap ini peneliti memilih hasil wawancara dan dokumentasi yang belum terstruktur, sehingga peneliti memperoleh data yang relevan terhadap Citra Polri Bagi Masyarakat (Analisis Citra Polri Dalam Pilpres 2019 Bagi Masyarakat Kota Palembang).

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhanaan jelas agar mudah dibaca. Penyajian data juga dimaksudkan agar para pengamat dapat dengan mudah memahami apa yang kita ajukan untuk selanjutnya dilakukan penilaian atau perbandingan dan lain lain. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menjelaskan, memaparkan data dengan memilih inti informasi terkait dengan

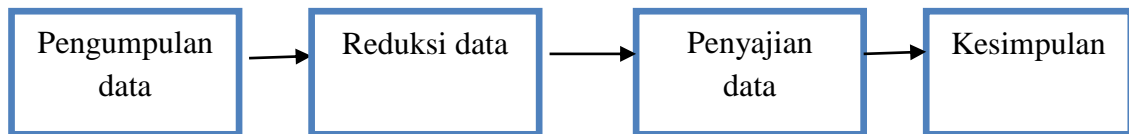
³⁴Insanajisubakti.wordpress.com. Diakses pada 22 Juli 2019.

Citra Polri Bagi Masyarakat (Analisis Citra Polri Dalam Pilpres 2019 Bagi Masyarakat Kota Palembang).

c. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan adalah bagian akhir atau bagian kesimpulan, yang semua data disimpulkan secara singkat, padat, dan jelas. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik permasalahan tentang Citra Polri Bagi Masyarakat (Analisis Citra Polri Dalam Pilpres 2019 Bagi Masyarakat Kota Palembang).

Gambar 1.2. Teknik Analisis Data



Sumber : Diolah Peneliti.

H. Sistematika Penulisan Laporan

Sistematika penulisan pada penelitian ini dibagi menjadi 4 Bab yang terdiri dari beberapa sub,bab,sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, rumusan masalah,tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang lokasi dari objek yang akan diteliti, bertempat di Lokasi Palembang dengan berfokus pada tanggapan masyarakat terhadap Citra Polri dalam Pilpres 2019.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menguraikan hasil temuan serta menganalisisnya menggunakan teori yang telah di tetapkan sebelumnya pada Bab I dikerangka teori.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian .